

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 153 TAHUN 2020 SERI E**

---

BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 150 TAHUN 2020

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANGSARI  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal untuk Unit Kerja yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Karang Sari Kabupaten Cirebon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3, Seri E.3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 11, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2);

20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi, Fungsi Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 43, Seri D.11).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANGSARI KABUPATEN CIREBON.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Karang Sari yang selanjutnya disebut Puskesmas Karang Sari adalah UPTD Puskesmas Karang Sari.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
12. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.

13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
16. Puskesmas non rawat inap merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*), pelayanan gawat darurat, dan pelayanan persalinan normal bagi Puskesmas yang tersedia fasilitas pelayanan persalinan normal.
17. Puskesmas rawat inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) SPM Kesehatan dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Kesehatan pada Puskesmas.

- (2) SPM Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

### BAB III

#### TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

##### Bagian Kesatu

##### Tugas Puskesmas

##### Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

##### Bagian Kedua

##### Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas Waktu Pencapaian

##### Pasal 4

Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Karang Sari, meliputi:

- a. UKP tingkat pertama; dan
- b. UKM tingkat pertama.

##### Pasal 5

UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan kesehatan keluarga bersifat UKP;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. pelayanan kefarmasian; dan
- g. pelayanan laboratorium.

## Pasal 6

UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan pelayanan kesehatan dasar meliputi:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. layanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV);
- m. pelayanan promosi kesehatan;
- n. pelayanan kesehatan lingkungan;
- o. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- p. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- q. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- r. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- s. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- t. pelayanan kesehatan olahraga;
- u. pelayanan kesehatan kerja; dan
- v. pelayanan kesehatan lainnya.

## Pasal 7

- (1) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk UKP pada Puskesmas Karang Sari tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada jenis pelayanan untuk UKM pada Puskesmas

Karangsari, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 8

- (1) Puskesmas yang menerapkan BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### PENERAPAN

##### Pasal 9

- (1) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
  - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
  - f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
  - g. pelaksanaan anggaran; dan
  - h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat
- (3) Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (4) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD Puskesmas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 22 Desember 2020

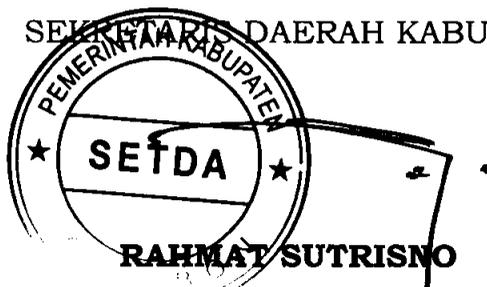
**BUPATI CIREBON,**

**TTD**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 24 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR      SERI

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 150 TAHUN 2020

TANGGAL : 22 DESEMBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANGSARI KABUPATEN CIREBON.

**INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN  
UNTUK UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PADA PUSKESMAS KARANGSARI**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pelayanan Pemeriksaan Umum	Cakupan rawat jalan peserta JKN	15 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP
		Cakupan kelengkapan pengisian Rekam Medis (RM)	100 %	86,67 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP

2	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Cakupan pelayanan rawat jalan kesehatan gigi dan mulut	100 %	118 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP
3	Pelayanan Kesehatan Keluarga yang Bersifat UKP (Pelayanan KIA,KB, Imunisasi, Perkesmas)	Cakupan kunjungan rawat jalan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP
		Cakupan kelengkapan pengisian Rekam Medis (RM)	100 %	86,67 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP
4	Pelayanan Gawat Darurat	Cakupan pelaksanaan pelayanan terhadap pasien gawat darurat	100 %	19,67 %	25 %	30 %	60 %	70 %	100 %	PJ UKP

5	Pelayanan Gizi yang Bersifat UKP	Cakupan konseling laktasi	18 %	18 %	18 %	18 %	18 %	18 %	18 %	PJ UKP
6	Pelayanan Kefarmasian	Persentase ketersediaan obat di Puskesmas	100 %	96,25 %	98 %	99 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP
		Persentase kesesuaian obat dengan formularium nasional	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP

7	Pelayanan Laboratorium	Cakupan pemeriksaan laboratorium puskesmas	100 %	24,70 %	30 %	60 %	80%	90 %	100 %	PJ UKP
---	------------------------	--	-------	---------	------	------	-----	------	-------	--------

**BUPATI CIREBON,**

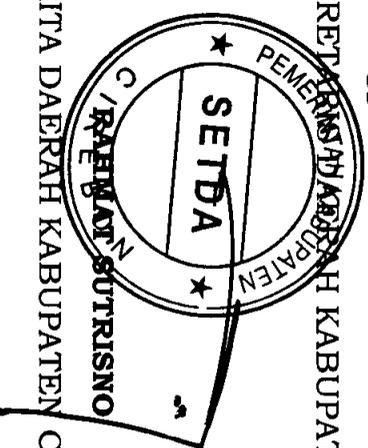
**TTD**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber

pada tanggal **28 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR**153** SERI **■**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 150 TAHUN 2020

TANGGAL : 22 DESEMBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANGSARI KABUPATEN CIREBON.

**INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA PUSKESMAS KARANGSARI**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %	100,5 %	100,5 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM













		<p>k. Pendampingan Pelaksanaan Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) tentang Kesehatan mendapat pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat (SMD, MMD)</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM
14.	<p>Pelayanan Kesehatan Lingkungan</p>	<p>a. Persentase penduduk terhadap sanitasi layak (jamban sehat)</p>	58,28 %	84,4 %	85 %	87 %	90 %	95 %	97 %	PJ UKM
		<p>b. Jumlah desa yang melaksanakan STBM</p>	40 %	42,86 %	47 %	52 %	57 %	62 %	67 %	PJ UKM



15. Pelayanan Gizi yang Bersifat UKM	a. Persentase Remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM
	b. Persentase Ibu Hamil mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM
	c. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	50 %	79,53 %	80 %	82 %	84 %	86 %	90 %		PJ UKM
	d. Persentase Bayi umur 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	50 %	81,18 %	82 %	85 %	87 %	90 %	95 %		PJ UKM
	e. Persentase Balita yang Ditimbang berat badannya (D/S)	80 %	77,66 %	79 %	81 %	83 %	85 %	87 %		PJ UKM



		k. Persentase Balita Kurus mendapat Makanan Tambahan	90 %	63 %	65 %	70 %	80 %	90 %	100 %	PJ UKM
16.	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	a. Angka kesembuhan Kusta (MB dan PB)	100 %	12,5 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	PJ UKM
		b. Cakupan angka bebas jentik	95 %	96,3 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM
		c. Cakupan penemuan penderita pneumonia	86 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM
		d. Cakupan pelayanan diare	100 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM
		e. Cakupan pelayanan penderita filariasis	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM



		k. Cakupan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tetanus Difteri (Td)	98 %	97,88 %	98 %	98,5%	99 %	99,5%	100 %	PJ UKM
		l. Cakupan ketepatan surveilans terpadu penyakit	90%	90 %	90%	90 %	90%	90 %	90%	PJ UKM
		m. Cakupan kelengkapan surveilans terpadu	90%	90 %	90%	90 %	90%	90 %	90%	PJ UKM
		n. Cakupan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM
17.	Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	a. Asuhan keperawatan individu kunjungan rawat jalan	100 %	66 %	70 %	80 %	85 %	90 %	100 %	PJ UKM







	Olahraga	b. Pengukuran kebugaran anak sekolah	100 %	96,34 %	97 %	97,5%	98 %	99 %	100 %	PJ UKM
		c. Pengukuran kebugaran guru olahraga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM
		d. Pembinaan kelompok olahraga	100 %	70 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %	PJ UKM
21	Pelayanan Kesehatan Kerja	a. Pembentukan pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM
		b. Pendataan Perusahaan (Industri)	20 %	29 %	30 %	31 %	32 %	33 %	35 %	PJ UKM

22	Pelayanan Kesehatan Lainnya	a. Cakupan penanganan kasus kelainan refraksi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM
		b. Penanganan katarak	100 %	20,8 %	20,8 %	50 %	70 %	80 %	100 %	PJ UKM

**BUPATI CIREBON,**

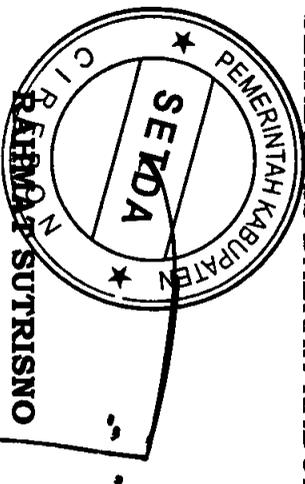
**TTD**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber

pada tanggal **20 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR **153** SERI **B**

### LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 150 TAHUN 2020

TANGGAL : 22 DESEMBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KARANGSARI KABUPATEN CIREBON.

#### INDIKATOR SPM UKP

##### 1. Pelayanan Pemeriksaan Umum

###### a. Cakupan rawat jalan peserta JKN

Judul	Cakupan rawat jalan peserta JKN
Dimensi Mutu	Kesehatan dan efektivitas
Tujuan	Tersedianya Pelayanan Pemeriksaan Umum untuk kepesertaan JKN di Puskesmas
Definisi Operasional	Cakupan rawat jalan adalah jumlah kunjungan kasus (baru) rawat jalan di sarana kesehatan strata pertama
Frekuensi Pengumpulan Data	1 tahun
Periode Analisa	1 tahun
Nominator	Jumlah kunjungan kepesertaan JKN di Puskesmas dalam kurun waktu 1 Tahun
Denominator	Jumlah kunjungan kepesertaan JKN di Puskesmas dalam kurun waktu 1 Tahun
Sumber Data	<i>Primary care (Pcare)</i> BPJS
Target	15 %
Langkah Kegiatan	Mendata pasien yang datang ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan kepesertaan JKN kemudian menganalisisnya
Penanggung jawab pengumpulan data	Koordinator Pelayanan Pemeriksaan Umum

b. Cakupan kelengkapan pengisian Rekam Medis (RM)

Judul	Cakupan kelengkapan pengisian Rekam Medis (RM)
Dimensi Mutu	Kesehatan dan efektivitas
Tujuan	Kelengkapan data dari pasien pada saat mendapatkan pelayanan di Puskesmas
Definisi Operasional	Persentase kelengkapan pengisian rekam medis pada seluruh pasien Puskesmas pada kurun waktu satu tahun dibanding dengan jumlah seluruh kunjungan pasien Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	1 tahun
Periode Analisa	1 tahun
Nominator	Jumlah rekam medis pasien yang terisi lengkap di Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah kunjungan seluruh pasien di Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Rekam Medis
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Memeriksa dan mendata rekam medis yang lengkap dan tidak lengkap kemudian menganalisa dan menindaklanjuti hasil analisa
Penanggung Jawab Pengumpul data	Koordinator rekam medis

2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Cakupan pelayanan rawat jalan kesehatan gigi dan mulut

Judul	Cakupan pelayanan rawat jalan kesehatan Gigi dan Mulut
Dimensi Mutu	Kesehatan dan efektivitas

Tujuan	Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada pasien yang memerlukan pemeriksaan
Definisi Operasional	Pelayanan rawat jalan kesehatan gigi dan mulut dalam bentuk upaya promotif, preventif dan kuratif sederhana seperti pencabutan gigi tetap, pengobatan dan penambalan sementara yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan
Frekuensi Pengumpulan Data	1 tahun
Periode Analisa	1 tahun
Nominator	Jumlah kunjungan baru pasien rawat jalan di ruang gigi Puskesmas dan jaringannya yang berasal dari wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	4% jumlah penduduk dalam wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Register
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Mendata pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kemudian menganalisanya
Penanggung Jawab Pengumpul data	Koordinator pelayanan kesehatan gigi dan mulut

### 3. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang Bersifat UKP

#### a. Cakupan kunjungan rawat jalan

Judul	Cakupan kunjungan rawat jalan
Dimensi Mutu	Kesehatan dan efektivitas
Tujuan	Tersedianya Pelayanan Pemeriksaan kesehatan keluarga di Puskesmas
Definisi Operasional	Cakupan rawat jalan adalah jumlah kunjungan kasus (baru) rawat jalan di sarana kesehatan strata pertama
Frekuensi Pengumpulan Data	1 tahun

Periode Analisa	1 tahun
Nominator	Jumlah kunjungan pasien dalam wilayah di Puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah kunjungan pasien dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Register
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Mendata jumlah kunjungan pasien, baik baru, lama, dalam wilayah atau luar wilayah, kemudian menganalisa dan menindaklanjuti
Penanggung Jawab Pengumpul data	Koordinator Pelayanan Kesehatan Keluarga

b. Cakupan kelengkapan pengisian Rekam Medis (RM)

Judul	Cakupan kelengkapan pengisian Rekam Medis (RM)
Dimensi Mutu	Kesehatan dan efektivitas
Tujuan	Kelengkapan data dari pasien pada saat mendapatkan pelayanan di Puskesmas
Definisi Operasional	Persentase kelengkapan pengisian rekam medis pada seluruh pasien Puskesmas pada kurun waktu satu tahun dibanding dengan jumlah seluruh kunjungan pasien Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	1 tahun
Periode Analisa	1 tahun
Nominator	Jumlah rekam medis pasien yang terisi lengkap di Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah kunjungan seluruh pasien di Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Rekam Medis

Target	100 %
Langkah Kegiatan	Memeriksa dan mendata rekam medis yang lengkap dan tidak lengkap kemudian menganalisa dan menindaklanjuti hasil analisa
Penanggung Jawab Pengumpul data	Koordinator rekam medis

#### 4. Pelayanan Gawat Darurat

Cakupan pelaksanaan pelayanan terhadap pasien gawat darurat

Judul	Cakupan pelaksanaan pelayanan terhadap pasien gawat darurat
Dimensi Mutu	Kesehatan dan efektivitas
Tujuan	Tersedianya Pelayanan gawat darurat di Puskesmas
Definisi Operasional	Pelaksanaan pelayanan terhadap pasien gawat darurat di Ruang Tindakan, dengan wewenang penuh yang dipimpin oleh dokter
Frekuensi Pengumpulan Data	1 tahun
Periode Analisa	1 tahun
Nominator	Kunjungan pasien baru ruang gawat darurat di Puskesmas baik dalam dan luar wilayah Puskesmas yang ditangani oleh Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	15 % kunjungan rawat jalan dalam satu tahun
Sumber Data	Register ruang tindakan
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Mendata jumlah pasien baru ruang gawat darurat kemudian menganalisa
Penanggung Jawab Pengumpul data	Koordinator Pelayanan Gawat Darurat

5. Pelayanan Gizi yang Bersifat UKP

Cakupan konseling Laktasi

Judul	Cakupan konseling Laktasi
Dimensi Mutu	Kesehatan dan efektivitas
Tujuan	Tersedianya pelayanan konseling laktasi di Puskesmas
Definisi Operasional	Proses komunikasi dua arah antara konselor dan klien untuk membantu klien mengenali dan mengatasi masalah dan membuat keputusan yang benar dalam mengatasi masalah laktasi yang dihadapinya
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan sekali
Periode Analisa	6 bulan sekali
Nominator	Jumlah yang mendapat konseling laktasi dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah ibu hamil dan ibu nifas yang berkunjung ke Puskesmas
Sumber Data	KOHORT Ibu, laporan kelas ibu hamil, register konseling
Langkah Kegiatan	Pengkajian, diagnosa, intervensi, monitoring dan evaluasi
Standar	18 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Koordinator Pelayanan Gizi Puskesmas

6. Pelayanan Kefarmasian

a. Persentase ketersediaan obat di Puskesmas

Judul	Persentase ketersediaan obat di Puskesmas
Dimensi Mutu	Persentase kesesuaian obat dengan formularium nasional
Tujuan	Tergambarnya ketersediaan obat di Puskesmas

Definisi Operasional	Tersedianya obat dan vaksin indikator di Puskesmas untuk program pelayanan kesehatan dasar, Pemantauan dilaksanakan terhadap ketersediaan 20 jenis obat esensial di Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	1 tahun
Periode Analisa	1 tahun
Nominator	Jumlah kumulatif jenis obat indikator yang tersedia
Denominator	Jumlah kumulatif jenis obat indikator yang tersedia dikali 100 %
Sumber Data	Format ketersediaan obat
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Mendata ketersediaan obat yang didapat dari gudang obat dan menganalisa
Penanggung jawab pengumpulan data	Koordinator Farmasi

b. Persentase kesesuaian obat dengan Formularium Nasional

Judul	Persentase kesesuaian obat dengan formularium nasional
Dimensi Mutu	Persentase kesesuaian obat dengan formularium nasional
Tujuan	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi pengobatan sehingga tercapai penggunaan obat rasional
Definisi Operasional	Persentase kesesuaian obat dengan formularium nasional adalah persentase kesesuaian jenis obat yang tersedia dengan Formularium Nasional (Fornas) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Frekuensi Pengumpulan Data	1 tahun
Periode Analisa	1 tahun

Nominator	Jumlah jenis obat yang sesuai dengan Fornas
Denominator	Jumlah jenis obat yang tersedia di Puskesmas
Sumber Data	Data jumlah resep
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Merekap dan mendata dari resep yang ada kemudian menganalisa
Penanggung jawab pengumpulan data	Koordinator Farmasi

## 7. Pelayanan Laboratorium

### Cakupan pemeriksaan Laboratorium Puskesmas

Judul	Cakupan pemeriksaan Laboratorium Puskesmas
Dimensi Mutu	Kesehatan dan efektivitas
Tujuan	Tersedianya pemeriksaan laboratorium di Puskesmas
Definisi Operasional	Cakupan jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium Puskesmas adalah jumlah pemeriksaan laboratorium dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas keseluruhan
Frekuensi Pengumpulan Data	1 tahun
Periode Analisa	1 tahun
Nominator	Jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan laboratorium di Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun

Denominator	Jumlah kunjungan pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium di Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Register laboratorium
Target	20%
Langkah Kegiatan	Merekap dan mendata jumlah kunjungan pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium kemudian menganalisa
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas Laboratorium

**BUPATI CIREBON,**

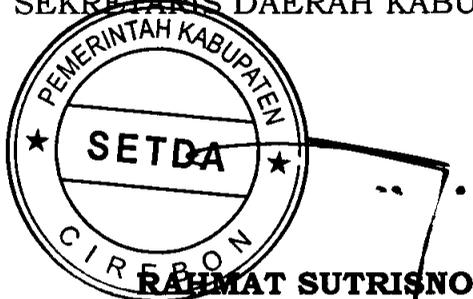
**TTD**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber

pada tanggal **28 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR **153**SERI ■

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 150 TAHUN 2020

TANGGAL : 22 DESEMBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT KARANGSARI  
KABUPATEN CIREBON.**INDIKATOR SPM UKM**

## 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Judul	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan Puskesmas dalam mengakses pelayanan ibu hamil
Definisi Operasional	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu tahun yang sama
Sumber Data	SIMPUS dan KOHORT IBU
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan ibu hamil, pemeriksaan antenatal, pengisian dan pemanfaatan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), rujukan
Penanggung Jawab	Bidan koordinator KIA

## 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Judul	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Untuk mencegah AKI dan AKB dari proses kehamilan dan persalinan
Definisi Operasional	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja
Denominator	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	SIMPUS, KOHORT IBU dan KOHORT BAYI
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan ibu bersalin, pelayanan persalinan, pengisian dan pemanfaatan buku KIA
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator KIA

## 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Judul	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Untuk mencegah kematian neonatus dan kecacatan bayi baru lahir
Definisi Operasional	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun

Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	SIMPUS, dan KOHORT BAYI, Buku KIA, Klinik dan BPM
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pengisian dan pemanfaatan buku KIA, pencatatan dan pelaporan, rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir (bila diperlukan)
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator KIA, dan Koordinator MTBM

#### 4. Pelayanan Kesehatan Balita

Judul	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Menemukan secara dini gangguan kesehatan dan kelainan tumbuh kembang yang terjadi pada balita
Definisi Operasional	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat

	<p>pelayanan kesehatan sesuai standar + jumlah balita usia 34-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar</p>
Denominator	<p>Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama</p>
Sumber Data	<p>SIMPUS, KOHORT BALITA, Buku KIA, Kartu Menuju Sehat (KMS) dan Register MTBS</p>
Target	<p>100%</p>
Langkah Kegiatan	<p>Pendataan Balita 0-59 bulan, pelayanan kesehatan Balita, pengisian dan pemanfaatan buku KIA, pencatatan dan pelaporan, pelayanan rujukan</p>
Penanggung Jawab	<p>Bidan koordinator KIA, Koordinator MTBM, MTBS dan Nutrisionis</p>

#### 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Judul	<p>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar</p>
Dimensi Mutu	<p>Keselamatan dan kualitas</p>
Tujuan	<p>Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar</p>
Definisi Operasional	<p>Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun ajaran</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	<p>Satu tahun sekali</p>
Periode Analisa	<p>Satu tahun sekali</p>
Nominator	<p>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun ajaran</p>
Denominator	<p>Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun</p>

	waktu satu tahun ajaran yang sama
Sumber Data	Hasil pencatatan dan pelaporan penjarangan anak sekolah (status gizi, tanda vital, kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan indera)
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, pemberian pelayanan skrining kesehatan, tindak lanjut hasil penjarangan, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program UKS

#### 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Judul	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Dimensi Mutu	Kualitas dan kontinuitas
Tujuan	Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
Definisi operasional	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	SIMPUS dan hasil pencatatan dan pelaporan kunjungan pasien, serta hasil kegiatan POSBINDU
Target	100%
Langkah Kegiatan	Skrining faktor resiko PTM, konseling tentang

	faktor risiko PTM, pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program PTM

#### 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Judul	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas kesehatan
Tujuan	Agar setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah semua warga Negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	SIMPUS, Pelaporan dan pencatatan kunjungan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran usia lanjut, skrining kesehatan lansia, pencatatan dan pelaporan termasuk pemberian buku kesehatan lansia, pelayanan rujukan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program Usia Lanjut

## 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Judul	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja
Definisi Operasional	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah penderita hipertensi usia $\geq 15$ tahun di dalam wilayah yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah penderita hipertensi usia $\geq 15$ tahun yang berada di dalam wilayah kerja Puskesmas berdasarkan angka prevelensi kecamatan dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Kohort Kunjungan penderita hipertensi
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan penderita hipertensi menurut wilayah kerja Puskesmas, melakukan penemuan kasus hipertensi untuk seluruh pasien usia $\geq 15$ tahun di Puskesmas, melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi untuk perubahan gaya hidup (diet seimbang, istirahat yang cukup, aktifitas fisik, dan kelola stress) serta edukasi minum obat dan/atau terapi farmakologi, melakukan rujukan ke

	Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program PTM

#### 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)

Judul	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas kesehatan
Tujuan	Setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja
Definisi Operasional	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah penderita DM usia $\geq 15$ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah estimasi penderita DM usia $\geq 15$ tahun yang berada di dalam wilayah kerja berdasarkan angka prevalensi Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Kohort Kunjungan penderita Diabetes Militus
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan penderita DM menurut wilayah kerja Puskesmas, Skrining penderita DM untuk seluruh pasien di Puskesmas, melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi,

	melakukan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi, penyediaan peralatan kesehatan DM, penyediaan obat DM, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program PTM

#### 10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Judul	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap penderita ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Definisi Operasional	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah ODGJ berat di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah ODGJ berat berdasarkan prevalensi Kabupaten di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Kohort Kunjungan Penderita ODGJ
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan penderita ODGJ berat menurut data estimasi wilayah kerja Puskesmas, melakukan diagnosis ODGJ berat dan melakukan penatalaksanaan medis, pelaksanaan kunjungan rumah (KIE kesehatan jiwa, melatih perawatan diri, minum obat sesuai anjuran dokter dan berkesinambungan, kegiatan rumah

	tangga dan aktivitas bekerja sederhana), melakukan rujukan ke FKRTL atau Rumah Sakit Jiwa (RSJ)
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Jiwa

#### 11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TBC)

Judul	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
Definisi Operasional	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Denominator	Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan TB
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, edukasi, rujukan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program TB

#### 12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)

Judul	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender,

	pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar.
Definisi Operasioonal	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu yang sama
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu minggu dua kali
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Register kunjungan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Penentuan sasaran, pemetaan penemuan kelompok sasaran, promosi kesehatan dan penyuluhan, Jejaring dan Kemitraan, sosialisasi pecegahan, pemeriksaan deteksi dini HIV, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja SPM, rujukan jika diperlukan
Penanggung Jawab Pengumpul data	Penanggung jawab program HIV

### 13. Pelayanan Promosi Kesehatan

- a. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga

Judul	Pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas

Tujuan	Merubah perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga untuk meningkatkan derajat kesehatan
Definisi Operasional	<p>Pembinaan PHBS di tatanan Rumah Tangga adalah pengkajian dan pembinaan PHBS di tatanan Rumah Tangga dengan melihat 10 indikator, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Linakes (Persalinan oleh tenaga kesehatan)</li> <li>2. Memberi ASI Eksklusif</li> <li>3. Menimbang bayi dan balita setiap bulan</li> <li>4. Menggunakan air bersih</li> <li>5. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih</li> <li>6. Menggunakan jamban sehat</li> <li>7. Memberantas jentik</li> <li>8. Makan sayur dan buah</li> <li>9. Melakukan aktivitas fisik</li> <li>10. Tidak merokok di dalam rumah pada setiap rumah tangga yang ada di wilayah kerja Puskesmas</li> </ol>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah rumah tangga ber-PHBS di wilayah kerja Puskesmas
Denominator	Seluruh rumah tangga yang ada di wilayah kerja Puskesmas
Sumber Data	Laporan Promosi Kesehatan, Laporan Konseling terpadu
Target	100%
Langkah Kegiatan	Penyuluhan dan pembinaan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Promosi Kesehatan

b. Penyuluhan PHBS keluarga, sekolah, tempat-tempat umum dan fasilitas kesehatan

Judul	Penyuluhan PHBS keluarga, sekolah, tempat-tempat umum dan fasilitas kesehatan
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Merubah perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat dalam tatanan keluarga, sekolah, tempat-tempat umum dan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan
Definisi Operasional	<p>a. Penyuluhan PHBS di keluarga adalah kegiatan penyampaian informasi oleh petugas Puskesmas/mitra kerja Puskesmas dengan sasaran keluarga dan anggotanya yang mendapat intervensi PIS/PK atau Keluarga yang tidak ber-PHBS, didukung alat bantu/media penyuluhan</p> <p>b. Penyuluhan PHBS di Sekolah adalah Kegiatan penyampaian informasi oleh petugas Puskesmas/mitra kerja Puskesmas secara berkelompok dengan sasaran siswa, guru dan masyarakat sekolah</p> <p>c. Penyuluhan PHBS di Tempat-Tempat Umum adalah kegiatan penyampaian informasi oleh petugas Puskesmas/mitra kerja Puskesmas kepada pengelola tempat-tempat umum secara berkelompok (5-30 orang) dengan sasaran tempat-tempat Umum/TTU yang terdiri dari masjid, terminal, hotel, pasar, tempat wisata, dilaksanakan 2 kali dalam setahun, didukung alat bantu/media penyuluhan</p> <p>d. Penyuluhan PHBS di Fasilitas Kesehatan adalah kegiatan penyampaian informasi secara berkelompok (5-30 orang) kepada pengunjung Puskesmas dan jaringannya oleh petugas di dalam gedung Puskesmas dan</p>

	jaringannya (Pustu, Poskesdes), materi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), didukung alat bantu/media penyuluhan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah keluarga yang mendapat penyuluhan oleh petugas/mitra kerja di rumah</li> <li>b. Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan tentang PHBS di wilayah kerja Puskesmas</li> <li>c. Jumlah Tempat-Tempat Umum yang mendapat penyuluhan tentang PHBS di wilayah kerja Puskesmas</li> <li>d. Jumlah penyuluhan di Fasilitas Kesehatan</li> </ul>
Denominator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah seluruh sasaran intervensi PIS/PK atau keluarga tidak berPHBS di wilayah kerja Puskesmas</li> <li>b. Jumlah seluruh sekolah yang ada di wilayah kerja Puskesmas</li> <li>c. Jumlah seluruh Tempat-Tempat Umum di wilayah kerja Puskesmas</li> <li>d. Jumlah penyuluhan 2 kali dalam satu minggu selama satu bulan (8 kali) dalam setahun 8 x 12 bulan (96 kali)</li> </ul>
Sumber Data	Laporan Promosi Kesehatan, Laporan Konseling terpadu
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM, Penyediaan KIE, penyuluhan dan pembinaan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Promosi Kesehatan

c. Pembinaan PHBS di tatanan Institusi Kesehatan (Puskesmas dan jaringannya : Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes. dll)

Judul	Pembinaan PHBS di tatanan Institusi Kesehatan (Puskesmas dan jaringannya : Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes. dll)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Merubah perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat dalam tatanan Institusi Kesehatan (Puskesmas dan jaringannya : Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes. dll) untuk meningkatkan derajat kesehatan
Definisi Operasional	<p>Pembinaan PHBS di tatanan Institusi Kesehatan adalah pengkajian dan pembinaan PHBS di tatanan institusi kesehatan (Puskesmas dan jaringannya : Puskesmas pembantu, Polindes, Poskesdes, dll) dengan melihat 7 indikator meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menggunakan air bersih</li> <li>2. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir memakai sabun</li> <li>3. menggunakan jamban</li> <li>4. membuang sampah pada tempatnya</li> <li>5. tidak merokok</li> <li>6. tidak meludah sembarangan</li> <li>7. memberantas jentik nyamuk</li> </ol>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah institusi kesehatan ber-PHBS di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh institusi kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas
Sumber Data	Laporan Promosi Kesehatan, Laporan Konseling terpadu

Target	100%
Langkah Kegiatan	Penyuluhan dan pembinaan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Promosi Kesehatan

d. Pemberdayaan individu/keluarga melalui kunjungan rumah

Judul	Pemberdayaan individu/keluarga melalui kunjungan rumah
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan kemandirian individu, keluarga dan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi
Definisi Operasional	Pemberdayaan Individu/Keluarga adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan berupa kunjungan rumah sebagai tindak lanjut upaya promosi kesehatan di dalam gedung Puskesmas kepada pasien/keluarga yang karena masalah kesehatannya memerlukan pembinaan lebih lanjut dengan metoda KIP/K, didukung alat bantu/ media penyuluhan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah kunjungan rumah ke pasien/keluarga dalam wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran kunjungan rumah
Sumber Data	Laporan Promosi Kesehatan, Laporan Konseling Terpadu
Target	100%
Langkah Kegiatan	Kunjungan rumah pasien/keluarga di wilayah kerja
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Promosi Kesehatan

e. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dilihat melalui persentase (%) Strata Desa/Kelurahan Siaga Aktif

Judul	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dilihat melalui persentase (%) Strata Desa/Kelurahan Siaga Aktif
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Terwujudnya masyarakat desa yang peduli, tanggap, mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri
Definisi Operasional	<p>Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Siaga Aktif dengan Strata Purnama dan Mandiri minimal 50% dari jumlah Desa/Kelurahan yang ada.</p> <p>Indikator strata Desa/Kelurahan Siaga Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forum Masyarakat Desa/Kelurahan</li> <li>2. Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)/Kader Kesehatan</li> <li>3. Kemudahan Akses ke Pelayanan Kesehatan Dasar</li> <li>4. Posyandu dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)</li> <li>5. Dana untuk Desa/Kelurahan Siaga Aktif</li> <li>6. Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>7. Peraturan di Desa/Kelurahan tentang Desa/Kelurahan Siaga Aktif</li> <li>8. Pembinaan PHBS Rumah Tangga</li> </ol>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 6 bulan sekali
Periode Analisa	Setiap tahun
Nominator	Jumlah Desa/Kelurahan berStrata Desa/Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri
Denominator	Seluruh Desa/Kelurahan Siaga Aktif yang ada di wilayah kerja Puskesmas
Sumber Data	Laporan Promosi Kesehatan

Target	100%
Langkah Kegiatan	Pembentukan forum Desa Siaga Aktif, pembinaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Promosi Kesehatan

- f. Pembinaan UKBM dilihat melalui persentase (%) Posyandu strata Purnama dan Mandiri (Persentase Posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Strata Purnama dan Mandiri)

Judul	Pembinaan UKBM dilihat melalui persentase (%) Posyandu strata Purnama dan Mandiri (Persentase Posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Strata Purnama dan Mandiri)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan strata posyandu
Definisi Operasional	<p>a. Posyandu Purnama adalah Posyandu yang dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 orang atau lebih, cakupan kelima kegiatannya utamanya lebih dari 50%, mempunyai kegiatan tambahan lebih dari 2 kegiatan, dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% kepala keluarga di wilayah kerja posyandu.</p> <p>b. Posyandu mandiri adalah posyandu yang dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mempunyai kegiatan tambahan lebih dari 2 kegiatan serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% kepala keluarga yang bertempat tinggal di wilayah kerja posyandu.</p>

Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tahun
Nominator	Jumlah Posyandu strata Purnama dan Mandiri
Denominator	Seluruh Posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas
Sumber Data	Laporan Promosi Kesehatan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Membuat jadwal, pembinaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Promosi Kesehatan

g. Advokasi Puskesmas kepada Kuwu/Kelurahan, Camat dan Lintas Sektor

Judul	Advokasi Puskesmas kepada Kuwu/Kelurahan, Camat dan Lintas Sektor
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Mendapatkan komitmen atau dukungan kebijakan atau anggaran dalam bidang kesehatan
Definisi Operasional	Kegiatan advokasi yang dilakukan tenaga kesehatan Puskesmas dengan sasaran kepada Kuwu/Kelurahan, Camat, Lintas Sektor
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah kegiatan advokasi kepada Kuwu/Lurah, Camat/Lintas Sektor
Denominator	12 kali advokasi
Sumber Data	Laporan Promosi Kesehatan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Membuat jadwal, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Promosi Kesehatan

#### h. Penggalangan Kemitraan

Judul	Penggalangan Kemitraan
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Mendapatkan komitmen atau dukungan dalam bidang kesehatan
Definisi Operasional	Kegiatan-kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh Puskesmas di luar gedung dengan mitra kerja (unsur pemerintahan : Lintas Program, swasta/dunia usaha, LSM dan organisasi massa, organisasi profesi)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah kegiatan Puskesmas di luar gedung, dilaksanakan dengan mitra kerja
Denominator	12 kali kegiatan
Sumber Data	Laporan Promosi Kesehatan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Promosi Kesehatan

#### i. Orientasi Promosi Kesehatan (Promkes) bagi Kader

Judul	Orientasi Promosi Kesehatan (Promkes) bagi Kader
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Definisi Operasional	Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kader dalam Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang dilaksanakan dalam waktu tertentu dengan alokasi anggaran baik dari Puskesmas maupun dari mitra kerja serta dari anggaran lainnya.

Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap tahun
Periode Analisa	Setiap tahun
Nominator	Jumlah kader yang mengikuti kegiatan orientasi promosi kesehatan
Denominator	Jumlah seluruh kader di wilayah kerja Puskesmas
Sumber Data	Laporan Promosi Kesehatan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Membuat jadwal, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Promosi Kesehatan

j. Penggunaan Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dalam menyebarluaskan informasi

Judul	Penggunaan Media KIE dalam menyebarluaskan informasi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Untuk menyebarluaskan informasi kesehatan kepada masyarakat
Definisi Operasional	<p>Kegiatan penyebarluasan informasi kesehatan dengan menggunakan berbagai media Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang ada di Puskesmas, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam gedung : media cetak (leaflet, booklet, poster), alat peraga, media elektronik (TV, infokus)</li> <li>2. Luar gedung : spanduk, billboard, umbul-umbul.</li> <li>3. Media Elektronik : TV, radio, SMS</li> <li>4. Media Sosial (Medsos)</li> <li>5. Media Tradisional</li> </ol>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan

Nominator	Jumlah jenis media KIE yang digunakan untuk penyebarluasan informasi kesehatan
Denominator	5 jenis media (dalam gedung, luar gedung, media elektronik, medsos dan media tradisional)
Sumber Data	Laporan Promosi Kesehatan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Promosi Kesehatan

k. Pendampingan Pelaksanaan Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) tentang Kesehatan mendapat pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat (SMD, MMD)

Judul	Pendampingan Pelaksanaan SMD dan MMD tentang Kesehatan mendapat pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat (SMD, MMD)
Dimensi Mutu	Kualitas data
Tujuan	Agar kegiatan berjalan secara kontinyu sesuai kebutuhan masyarakat
Definisi Operasional	Kegiatan di Desa/Kelurahan yang ada di wilayah kerja yang memerlukan pemberdayaan masyarakat, dengan langkah-langkah kegiatan pertemuan tingkat Desa, SMD, MMD I dan II
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap tahun
Periode Analisa	Setiap tahun
Nominator	Jumlah Desa mendapat pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat (SMD, MMD)
Denominator	Jumlah Desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas
Sumber Data	Laporan Promosi Kesehatan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Membuat jadwal, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Promosi Kesehatan

14. Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Kesling)

a. Persentase penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (jamban sehat)

Judul	Persentase penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (jamban sehat)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan pelayanan agar seluruh penduduk mendapatkan akses jamban sehat
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan sanitasi kepada sasaran meliputi pendataan penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (jamban sehat)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di wilayah Puskesmas pada periode tertentu
Denominator	Jumlah penduduk di wilayah Puskesmas dan pada periode yang sama
Sumber Data	Laporan Kesling
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan, KIE, Pembinaan, Pemicuan, Pencatatan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Kesling

b. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Judul	Jumlah desa yang melaksanakan STBM
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Memberikan pelayanan pada seluruh desa di wilayah Puskesmas agar Stop Bebas Buang Air Besar (BABS) / <i>Open Defecation Free (ODF)</i>
Definisi Operasional	Jumlah Desa yang melaksanakan STBM di

	wilayah Puskesmas setiap tahunnya adalah dimana Desa yang melaksanakan ditandai Desa tersebut sudah melakukan pemecuan minimal 1 dusun/RW, adanya rencana kerja masyarakat (RKM) dan adanya <i>natural leader</i>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 4 bulan
Periode Analisa	Setiap 6 bulan
Nominator	Jumlah desa yang mendapatkan pemecuan sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh Desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam waktu yang sama
Sumber Data	Laporan Kesling
Target	100%
Langkah Kegiatan	Perkenalan, Bina Suasana, Pemecuan Pencatatan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Kesling

c. Persentase Inspeksi Kesehatan Lingkungan (Kesling) terhadap Sarana Air Bersih (SAB)

Judul	Persentase Inspeksi Kesehatan Lingkungan terhadap sarana air bersih
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan pelayanan kesling terhadap sarana air bersih (SAB)
Definisi Operasional	Pelayanan kesling terhadap SAB adalah pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap SAB di wilayah kerja Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan SAB sesuai

	standar di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh Desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Laporan Kesling
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan SAB, Pencatatan, Pelaporan, Monitoring, Evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Kesling

d. Persentase Inspeksi Kesehatan Lingkungan terhadap Pasar Sehat

Judul	Persentase Inspeksi Kesehatan Lingkungan terhadap Pasar Sehat
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan pelayanan kesehatan lingkungan terhadap pasar sehat
Definisi Operasional	Pelayanan kesling terhadap pasar sehat adalah kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pasar sehat
Frekuensi Pengumpulan Data	3 bulan sekali
Periode Analisa	6 tahun sekali
Nominator	Jumlah pasar yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pasar sehat sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh pasar yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam waktu tertentu
Sumber Data	Laporan Kesling
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pembinaan, Pengawasan, Pemeriksaan Sarana Pasar Sehat, Pencatatan, Pelaporan, Monitoring, Evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Kesling

e. Persentase Inspeksi Kesehatan Lingkungan terhadap Tempat Fasilitas Umum (TFU)

Judul	Persentase Inspeksi Kesehatan Lingkungan terhadap TFU
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan pelayanan agar seluruh fasilitas umum mendapatkan pelayanan kesling dan diketahui status kesehatannya
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan lingkungan terhadap TFU adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat fasilitas umum (TFU)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah TFU yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan TFU sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh TFU yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam waktu tertentu
Sumber Data	Laporan Kesling
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan secara TFU, Pencatatan, Pelaporan, Monitoring, Evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Kesling

f. Persentase Inspeksi Kesehatan Lingkungan terhadap Tempat Pengolahan Pangan (TPP)

Judul	Persentase Inspeksi Kesehatan Lingkungan terhadap TPP
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan pelayanan kesehatan lingkungan terhadap TPP
Definisi Operasional	Inspeksi Kesehatan Lingkungan terhadap TPP adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap TPP

Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah TPP yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan TPP sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh TPP yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam waktu tertentu
Sumber Data	Laporan Kesling
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pembinaan, Pengawasan, Pemeriksaan secara TPP, Pencatatan, Pelaporan, Monitoring, Evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Kesling

## 15. Pelayanan Gizi

### a. Persentase Remaja Putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)

Judul	Persentase Remaja Putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mencegah anemia pada remaja putri
Definisi Operasional	Jumlah remaja putri yang mendapat TTD secara rutin setiap minggu terhadap jumlah remaja putri yang ada
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 3 bulan
Periode Analisa	Setiap 3 bulan
Nominator	Jumlah remaja putri mendapat TTD
Denominator	Jumlah seluruh remaja putri 12-18 tahun di sekolah
Sumber Data	Laporan UKS, Kartu kepatuhan minum TTD pada remaja putri
Target	94,7%
Langkah Kegiatan	a. Siswi mencatat TTD yang didapat di Sekolah melalui kartu kepatuhan minum TTD

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Merekap formulir pemantauan program TTD remaja putri</li> <li>c. Menghitung persentase jumlah TTD yang diterima terhadap jumlah minggu yang dilalui, perhitungan dilakukan tiap 3 bulan</li> <li>d. Laporan tahunan menggunakan laporan triwulan 4</li> </ul>
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya UKS dan Pelaksana Upaya Gizi

b. Persentase Ibu Hamil mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet

Judul	Persentase Ibu Hamil mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mencegah anemia pada ibu hamil
Definisi Operasional	Persentase ibu hamil mendapat 90 TTD adalah jumlah ibu hamil yang selama kehamilan mendapat minimal 90 TTD terhadap jumlah sasaran ibu hamil
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah ibu hamil yang mendapat TTD minimal 90 tablet TTD
Denominator	Jumlah seluruh ibu hamil yang ada di wilayah kerja Puskesmas
Sumber Data	Kohort ibu
Target	74%
Langkah Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencatat jumlah TTD yang diberikan pada ibu hamil setiap kali kunjungan</li> <li>b. Merekap jumlah ibu hamil dengan usia kehamilan akhir trimester III</li> <li>c. Merekap jumlah ibu hamil yang mendapatkan TTD 90 tablet</li> </ul>

	d. Menghitung persentase ibu hamil yang mendapat TTD minimal 90 tablet
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator dan Pelaksana Upaya Gizi

c. Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Judul	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan Efektivitas
Tujuan	Meningkatkan cakupan ASI eksklusif
Definisi Operasional	<p>a. IMD adalah proses menyusui dimulai segera setelah lahir, IMD dilakukan dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya segera setelah lahir dan berlangsung minimal 1 jam</p> <p>b. Persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD adalah jumlah bayi baru lahir hidup yang mendapat IMD terhadap jumlah bayi baru lahir hidup</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah bayi baru lahir hidup yang mendapatkan IMD berkualitas sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh bayi baru lahir hidup di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Kohort bayi
Target	77,83%
Langkah Kegiatan	<p>a. Mencatat seluruh bayi baru lahir dan menentukan kategori IMD atau tidak IMD ke dalam kohort bayi</p> <p>b. Merekap jumlah bayi baru lahir dan kategori IMD</p>

	c. Menghitung persentase bayi baru lahir hidup melakukan IMD terhadap jumlah bayi baru lahir hidup yang ada
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator dan Pelaksana Upaya Gizi

d. Persentase Bayi umur 6 bulan mendapat ASI Eksklusif

Judul	Persentase Bayi umur 6 bulan mendapat ASI Eksklusif
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Meningkatkan cakupan ASI eksklusif
Definisi Operasional	Persentase bayi umur 6 bulan mendapat ASI eksklusif adalah jumlah bayi mencapai umur 5 bulan 29 hari mendapat ASI eksklusif 6 bulan terhadap jumlah seluruh bayi mencapai umur 5 bulan 29 hari
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah bayi telah mencapai usia 5 bulan 29 hari mendapat ASI eksklusif
Denominator	Jumlah bayi telah mencapai umur 5 bulan 29 hari
Sumber Data	a. Kohort bayi b. Kohort ASI
Target	51,1%
Langkah Kegiatan	a. Mencatat hasil recall ASI eksklusif ke dalam KMS setiap bulan b. Mencatat KMS masing-masing balita ke dalam register posyandu c. Merekap jumlah bayi yang mencapai usia 6 bulan 0 hari atau lebih dengan kategori ASI eksklusif / tidak eksklusif d. Menghitung persentase usia 6 bulan mendapat ASI eksklusif
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator dan Pelaksana Upaya Gizi

e. Persentase Balita yang ditimbang berat badannya (D/S)

Judul	Persentase Balita yang ditimbang berat badannya (D/S)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan Efektifitas
Tujuan	Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat
Definisi Operasional	Persentase D/S adalah jumlah balita yang ditimbang terhadap balita yang ada di wilayah kerja Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah balita yang ditimbang pada waktu satu kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh proyeksi balita yang ada di wilayah pada kurun satu tertentu
Sumber Data	Sistem Informasi Posyandu (SIP) posyandu
Target	80%
Langkah Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencatat seluruh sasaran balita yang ada</li> <li>b. Mencatat hasil penimbangan</li> <li>c. Merekap jumlah balita yang melakukan penimbangan</li> <li>d. Menghitung persentase balita yang ditimbang</li> </ul>
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Gizi

f. Persentase Balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D)

Judul	Persentase Balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan Efektivitas
Tujuan	Mengetahui tingkat keberhasilan program
Definisi Operasional	Persentase balita ditimbang yang naik berat badannya adalah jumlah balita yang naik berat badannya terhadap jumlah balita yang ditimbang dikurangi balita tidak ditimbang bulan lalu dan balita baru

Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah balita yang naik berat badannya pada satu kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah balita yang ditimbang dikurangi balita yang tidak ditimbang bulan lalu dan balita baru
Sumber Data	SIP posyandu, kohort balita
Target	84,66%
Langkah Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencatat seluruh sasaran balita yang ditimbang</li> <li>b. Mencatat jumlah balita baru dan balita yang tidak ditimbang bulan lalu</li> <li>c. Menghitung jumlah balita yang ditimbang bulan ini dikurangi dengan balita baru dan balita yang tidak ditimbang bulan lalu</li> <li>d. Menghitung persentase balita yang naik berat badannya</li> </ul>
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Gizi

g. Persentase Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A

Judul	Persentase Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A
Dimensi Mutu	Keselamatan dan Kualitas
Tujuan	Meningkatkan cakupan vitamin A
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kapsul vitamin A adalah kapsul yang mengandung vitamin A dosis tinggi yaitu 100.000 Standar Internasional (SI) untuk bayi umur 6-11 bulan dan 200.000 SI untuk balita 12-59 bulan</li> <li>b. Jumlah bayi 6-11 bulan ditambah jumlah balita 12-59 bulan yang mendapat satu kapsul vitamin A pada periode 6 bulan terhadap jumlah seluruh balita 6-59 bulan</li> </ul>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 6 bulan

Periode Analisa	Setiap 6 bulan
Nominator	Jumlah bayi 6-11 bulan dan balita 6-59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A
Denominator	Jumlah seluruh bayi 6-59 bulan yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Laporan pemberian kapsul vitamin A balita
Target	100%
Langkah Kegiatan	a. Mencatat balita yang mendapat vitamin A b. Merekap balita yang menerima vitamin A berdasarkan kelompok umur c. Menghitung persentase balita yang mendapat vitamin A
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Gizi

h. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat Makanan Tambahan

Judul	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat Makanan Tambahan
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Meningkatkan status gizi ibu hamil mencegah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
Definisi Operasional	Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan terhadap jumlah ibu hamil KEK yang ada
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan
Denominator	Jumlah sasaran ibu hamil KEK yang ada
Sumber Data	Kohort ibu, Form laporan pemberian makanan tambahan ibu hamil
Target	73,72%

Langkah Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pemeriksaan Lingkar lengan (LILA) ibu hamil dan mencatat hasil pengukuran kedalam kohort ibu</li> <li>b. Merekap jumlah ibu hamil yang diperiksa LILA dan menentukan KEK / tidak</li> <li>c. Memberikan PMT kepada Bumil KEK</li> <li>d. Merekap pemberian PMT pada ibu hamil dengan kategori KEK</li> <li>e. Menghitung persentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan</li> </ul>
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator dan Pelaksana Upaya Gizi

i. Persentase Ibu Nifas mendapat kapsul vitamin A

Judul	Persentase Ibu Nifas mendapat kapsul vitamin A
Dimensi Mutu	Keselamatan dan Efektivitas
Tujuan	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), mengurangi penyakit infeksi pada persalinan, mempercepat proses pemulihan dan mencegah anemia
Definisi Operasional	Persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A adalah jumlah ibu nifas yang mendapat kapsul vitamin A sebanyak 2 kapsul terhadap jumlah ibu nifas yang ada
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah ibu nifas yang mendapat kapsul vitamin A sebanyak 2 kapsul
Denominator	Jumlah seluruh ibu nifas yang ada di wilayah kerja Puskesmas selama kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Kohort ibu
Target	75,11%
Langkah Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencatat seluruh ibu nifas</li> <li>b. Mencatat ibu nifas yang saat bersalin mendapat vitamin A dan jumlah vitamin A</li> </ul>

	yang didapat c. Menghitung persentase ibu nifas yang mendapat vitamin A 2 kapsul
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator dan Pelaksana Upaya Gizi

j. Persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan

Judul	Persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan
Dimensi Mutu	Keselamatan dan Efektivitas
Tujuan	Meningkatkan status gizi buruk
Definisi Operasional	Persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan adalah jumlah kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan sesuai dengan tata laksana gizi buruk terhadap jumlah kasus balita gizi buruk yang ditemukan di suatu wilayah pada periode tertentu
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai tata laksana gizi buruk
Denominator	Jumlah kasus balita gizi buruk yang ada di wilayah kerja Puskesmas
Sumber Data	a. Data hasil Bulan Penimbangan Balita (BPB) b. Laporan bulanan gizi
Target	100%
Langkah Kegiatan	a. Mencatat kasus gizi buruk yang ditemukan b. Kasus gizi buruk yang ditemukan segera ditangani dengan jenis perawatan yang sesuai dengan tata laksana gizi buruk/dirujuk c. Mencatat kasus balita yang ditangani d. Menghitung persentase kasus gizi buruk yang mendapat perawatan terhadap kasus gizi buruk yang ditemukan
Penanggung Jawab	Dokter Puskesmas

k. Persentase Balita Kurus mendapat Makanan Tambahan

Judul	Persentase Balita Kurus mendapat Makanan Tambahan
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Meningkatkan status gizi
Definisi Operasional	Jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan terhadap jumlah balita kurus
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan
Denominator	Jumlah seluruh balita kurus yang ada di wilayah kerja Puskesmas pada kurun satu waktu tertentu
Sumber Data	Laporan bulanan Puskesmas
Target	67,87%
Langkah Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pemantauan timbang dan mencatat hasil pengukuran ke dalam register</li> <li>b. Menentukan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan (BB)/Tinggi Badan (TB)</li> <li>c. Menghitung jumlah balita kurus</li> <li>d. Merekap pemberian makanan tambahan pada balita kurus</li> <li>e. Menghitung persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan</li> </ul>
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator dan Pelaksana Upaya Gizi

16. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a. Angka kesembuhan Kusta tipe Multi Basiler (MB) dan Pausi Basiler (PB)

Judul	Angka kesembuhan Kusta tipe Multi Basiler (MB) dan Pausi Basiler (PB)
Dimensi Mutu	Ketepatan waktu dan hubungan antar manusia

Tujuan	Mencegah penularan kusta dengan minum obat MDR dengan teratur sehingga tidak terjadi kecacatan fisik pada pasien kusta
Definisi Operasional	Jumlah kasus baru PB dan MB dalam periode kohort satu tahun yang sama yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu. PB 6 dosis dalam 6-9 bulan dan untuk MB 12 dosis dalam 12-18 bulan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap 3 bulan
Nominator	Semua pasien kusta dengan tipe PB dan MB diobati sesuai dengan tipe masing-masing, PB 6 dosis dalam 6-9 bulan dan MB 12 dosis dalam 12-18 bulan dan sembuh
Denominator	Pasien kusta yang dalam pengobatan sudah ditangani sesuai dengan prosedur pengobatan dengan tipe PB atau MB
Sumber Data	KOHORT Kusta
Target	100%
Langkah Kegiatan	Penemuan penderita, pemberian obat, observasi, evaluasi, tindak lanjut
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Kusta dan Frambusia

b. Cakupan angka bebas jentik

Judul	Cakupan angka bebas jentik
Dimensi Mutu	Keamanan, hubungan antar manusia
Tujuan	Mengetahui kepadatan jentik nyamuk penular Demam Berdarah Dengue (DBD) di suatu wilayah
Definisi Operasional	Persentase rumah dan tempat-tempat umum yang diperiksa jentik
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan

Nominator	Jumlah rumah dan tempat umum yang diperiksa jentik dan hasilnya negatif tidak ada jentik dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah rumah dan tempat-tempat umum yang diperiksa jentik
Sumber Data	Hasil kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB)
Target	95%
Langkah Kegiatan	Melaksanakan pemeriksaan jentik, merekap hasil pemeriksaan jentik, menganalisa hasil pemeriksaan jentik, menentukan nilai Angka Bebas Jentik (ABJ) di suatu wilayah
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya DBD

c. Cakupan penemuan penderita pneumonia

Judul	Cakupan penemuan penderita pneumonia
Dimensi Mutu	Kesinambungan
Tujuan	Untuk meningkatkan jumlah penemuan kasus pneumonia pada balita
Definisi Operasional	Penemuan kasus pneumonia balita oleh Puskesmas baik di dalam gedung maupun di luar gedung
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah kasus penderita pneumonia balita yang ditangani di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah perkiraan kasus penderita pneumonia balita di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Poli anak/MTBS, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan (BP) desa
Target	86%
Langkah Kegiatan	Mengumpulkan data penderita pneumonia yang berobat di Puskesmas, Merekap data dan melakukan analisa

Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)
------------------	--

d. Cakupan pelayanan diare

Judul	Cakupan pelayanan diare
Dimensi Mutu	Kesinambungan
Tujuan	Semua penderita diare ditangani sesuai standar pengobatan Puskesmas
Definisi Operasional	Persentasi jumlah cakupan pelayanan diare di wilayah kerja Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah penderita diare semua umur yang dilayani dalam satu tahun
Denominator	Jumlah target penderita diare semua umur
Sumber Data	Register Pelayanan Kesehatan Keluarga
Target	100%
Langkah Kegiatan	Mengumpulkan data cakupan diare yang ada di wilayah kerja Puskesmas, merekap data dan melakukan analisa
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Diare

e. Cakupan pelayanan penderita filariasis

Judul	Cakupan pelayanan penderita filariasis
Dimensi Mutu	Hubungan antar manusia, Kenyamanan
Tujuan	Meningkatkan cakupan program pengendalian kecacingan pada anak usia sekolah dan anak pra sekolah sehingga menurunkan angka kecacingan dan tidak menjadikan masalah kesehatan di masyarakat
Definisi Operasional	Filariasis / kaki gajah adalah pembengkakan tungkai akibat infeksi cacing jenis Filaria. Cacing ini menyerang pembuluh getah bening dan ditularkan melalui gigitan nyamuk

Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 6 bulan
Periode Analisa	Setiap 6 bulan
Nominator	Jumlah kasus filariasis yang ditemukan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh kasus filariasis yang ditemukan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Hasil kegiatan pemberian POPM pada anak sekolah dan prasekolah serta posyandu
Target	100%
Langkah Kegiatan	a. Melaksanakan pemberian POPM serempak di posyandu, PAUD, TK, SDN/MI b. Menganalisa hasil kegiatan POPM c. Menetapkan hasil nilai kegiatan
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Penyakit Filariasis

f. Cakupan pelayanan deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil

Judul	Cakupan pelayanan deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil
Dimensi Mutu	Keselamatan, hubungan antar manusia, keterjangkauan atau akses
Tujuan	Mencegah adanya penularan pada bayi yang dilahirkan
Definisi Operasional	Kegiatan deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil beresiko tinggi yang dilaksanakan di dalam gedung dan luar gedung di wilayah kerja Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah ibu hamil yang dilakukan pemeriksaan hepatitis B di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah ibu hamil di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Sumber Data	Laporan penyakit menular
Target	80%
Langkah Kegiatan	Konseling, Laboratorium, Hasil Pemeriksaan, Tindak Lanjut
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Penyakit Hepatitis

g. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Judul	Cakupan UCI Desa
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan kekebalan ( <i>Herd Immunity</i> ) terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) di setiap desa
Definisi Operasional	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah Desa/Kelurahan UCI di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh Desa/Kelurahan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Laporan Bulanan Imunisasi
Target	80%
Langkah Kegiatan	Penentuan sasaran, menentukan jenis vaksin yang diberikan, pemberian vaksinasi, pencatatan laporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Imunisasi

h. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

Judul	Imunisasi Dasar Lengkap
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)

Definisi Operasional	Imunisasi dasar lengkap adalah Cakupan imunisasi yang diberikan pada bayi 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, Polio 4 kali, DPTHB-Hib 3 kali, Campak 1 kali) di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah bayi 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran bayi 0-11 bulan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Laporan Bulanan Imunisasi
Target	93%
Langkah Kegiatan	Penentuan sasaran, menentukan jenis vaksin yang diberikan, pemberian vaksinasi, pencatatan laporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Imunisasi

i. Cakupan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Campak / *Measles Rubella* (MR)

Judul	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Campak (MR)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan kekebalan terhadap penyakit campak
Definisi Operasional	Cakupan BIAS MR adalah Jumlah siswa kelas 1 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat, laki-laki dan perempuan yang mendapat imunisasi campak di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	1 tahun sekali

Periode Analisa	1 tahun sekali
Nominator	Jumlah anak SD/MI atau yang sederajat kelas 1 yang mendapat imunisasi MR di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah siswa kelas 1 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Laporan BIAS
Target	98%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, sosialisasi lintas sektor, pembuatan jadwal, pemberian vaksinasi, pencatatan laporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Imunisasi

j. Cakupan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Difteri Tetanus (DT)

Judul	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) DT
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan kekebalan terhadap penyakit Difteri dan Tetanus
Definisi Operasional	Cakupan BIAS DT adalah Jumlah siswa kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, laki-laki dan perempuan yang mendapatkan imunisasi DT di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	1 tahun sekali
Periode Analisa	1 tahun sekali
Nominator	Jumlah anak SD/MI atau yang sederajat kelas 1 yang mendapat imunisasi DT di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah siswa kelas 1 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Laporan BIAS
Target	98%

Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, sosialisasi lintas sektor, pembuatan jadwal, pemberian vaksinasi, pencatatan laporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Imunisasi

k. Cakupan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tetanus Difteri (Td)

Judul	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Td
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan kekebalan terhadap penyakit tetanus dan difteri
Definisi Operasional	Cakupan BIAS Td adalah jumlah siswa kelas 2 dan kelas 5 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat, laki-laki dan perempuan yang mendapatkan imunisasi Td di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	1 tahun sekali
Periode Analisa	1 tahun sekali
Nominator	Jumlah anak SD/MI atau yang sederajat kelas 2 dan kelas 5 yang mendapat imunisasi Td di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah siswa kelas 2 dan kelas 5 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Laporan BIAS
Target	98%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, sosialisasi lintas sektor, pembuatan jadwal, pemberian vaksinasi, pencatatan laporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Imunisasi

1. Cakupan ketepatan surveilans terpadu penyakit

Judul	Cakupan ketepatan surveilans terpadu penyakit
Dimensi Mutu	Ketepatan waktu
Tujuan	Pengumpulan data hasil pengamatan penyakit bulanan di wilayah kerja Puskesmas secara tepat
Definisi Operasional	Cakupan ketepatan surveilans terpadu penyakit adalah cakupan ketepatan pengumpulan data hasil pengamatan penyakit bulanan di wilayah kerja Puskesmas dalam waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah laporan surveilans terpadu penyakit yang dilaporkan Puskesmas paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dalam kurun waktu yang sama
Denominator	12 bulan (satu tahun)
Sumber Data	Laporan W2 KPU (laporan mingguan monitor penyakit KLB/Kejadian Luar Biasa), Ewars ( <i>Early Warning Alert and Response System</i> =Sistem Kewaspadaan Dini)
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pengumpulan data hasil pengamatan penyakit bulanan
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Surveilans

m. Cakupan kelengkapan surveilans terpadu penyakit

Judul	Cakupan kelengkapan surveilans terpadu penyakit
Dimensi Mutu	Informasi
Tujuan	Pengumpulan data dengan lengkap
Definisi Operasional	Cakupan kelengkapan data hasil pengamatan penyakit bulanan di wilayah Puskesmas dalam waktu 1 tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan

Periode Analisa	Setiap tahun
Nominator	Jumlah laporan yang dilaporkan Puskesmas pada kurun waktu 1 tahun
Denominator	12 bulan (satu tahun)
Sumber Data	Laporan bulanan
Target	90%
Langkah Kegiatan	Pengumpulan data hasil pengamatan penyakit bulanan
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Surveilans

n. Cakupan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)

Judul	Cakupan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis dan informasi
Tujuan	Kewaspadaan dini dan respon penyakit potensial KLB
Definisi Operasional	Cakupan penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan dalam waktu 1x24 jam
Frekuensi Pengumpulan Data	1x24 jam
Periode Analisa	Setiap tahun
Nominator	Jumlah KLB penyakit dan keracunan makanan yang ditanggulangi 1x24 jam dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah KLB penyakit dan keracunan makanan dalam kurun waktu 1 tahun
Sumber Data	Kasus KLB penyakit dan keracunan makanan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pengumpulan data, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi kasus KLB
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Surveilans

17. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

a. Asuhan keperawatan individu kunjungan rawat jalan

Judul	Asuhan keperawatan individu kunjungan rawat jalan
Dimensi Mutu	Jaminan kepastian, keamanan dan keselamatan
Tujuan	Mengetahui jumlah persentase dari asuhan keperawatan pada rawat jalan
Definisi Operasional	Jumlah pasien rawat jalan dalam gedung yang mendapat asuhan keperawatan individu langsung oleh perawat
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah pasien yang mendapat asuhan keperawatan langsung
Denominator	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan di dalam gedung
Sumber Data	Rekam Medik (RM) dan Laporan Perkesmas
Target	100%
Langkah Kegiatan	Anamnesa, diagnosa, perencanaan, implementasi dan evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Perkesmas

b. Cakupan keluarga mandiri III dan IV

Judul	Cakupan keluarga mandiri III dan IV
Dimensi Mutu	Akses pelayanan, efektifitas pelayanan, efisiensi pelayanan
Tujuan	Mengetahui hasil akhir dari kegiatan Asuhan Keperawatan Keluarga
Definisi Operasional	Cakupan hasil akhir tingkat kemandirian keluarga (KM III dan KM IV) pada keseluruhan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatannya, setelah mendapatkan asuhan keperawatan keluarga minimal 4x kunjungan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan

Nominator	Jumlah keluarga yang dibina yang memenuhi kriteria KM III dan IV di wilayah kerja Puskesmas
Denominator	Seluruh keluarga rawan yang ada di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun
Sumber Data	Kohort Perkesmas, Laporan Program Perkesmas
Target	100%
Langkah Kegiatan	Anamnesa, diagnosa, perencanaan, implementasi dan evaluasi (sudah mencapai kemandirian III atau IV)
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Perkesmas

- c. Cakupan keluarga resiko tinggi mendapat asuhan keperawatan (askep) keluarga

Judul	Cakupan keluarga resiko tinggi mendapat askep keluarga
Dimensi Mutu	Akses pelayanan, efektifitas pelayanan, efisiensi pelayanan
Tujuan	Kemandirian keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi
Definisi Operasional	Jumlah keluarga yang mendapat asuhan keperawatan keluarga dan terdokumentasikan melalui asuhan keperawatan keluarga sesuai dengan permasalahan pada Indikator Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah keluarga yang mendapat asuhan keperawatan keluarga di wilayah kerja Puskesmas
Denominator	Jumlah sasaran keluarga yang bermasalah kesehatan dan tercatat dalam register R1 Perkesmas dalam kurun waktu 1 tahun
Sumber Data	Laporan Perkesmas

Target	80%
Langkah Kegiatan	Pendataan, kunjungan, pendokumentasian
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Perkesmas

- d. Cakupan Keluarga Mandiri (KM III dan IV) pada keluarga dengan Hipertensi yang mendapat asuhan keperawatan (askep) keluarga

Judul	Cakupan Keluarga Mandiri (KM III dan IV) pada keluarga dengan Hipertensi yang mendapat askep keluarga
Dimensi Mutu	Akses pelayanan dan keselamatan
Tujuan	Meningkatkan kemandirian keluarga dalam mengatasi hipertensi yang ada di keluarganya
Definisi Operasional	Cakupan hasil akhir tingkat kemandirian keluarga (KM III dan IV) pada keluarga dengan penderita hipertensi setelah mendapatkan asuhan keperawatan keluarga minimal 4x kunjungan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah KM III dan IV pada keluarga dengan penderita hipertensi di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah keluarga yang anggota keluarganya terdapat penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun
Sumber Data	Laporan Perkesmas
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan, Kunjungan, Pendokumentasian
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Perkesmas

- e. Cakupan Keluarga Mandiri (KM III dan IV) pada keluarga dengan ODGJ yang mendapat asuhan keperawatan (askep) keluarga

Judul	Cakupan Keluarga Mandiri (KM III dan IV) pada keluarga dengan ODGJ yang mendapat asuhan keperawatan (askep) keluarga
Dimensi Mutu	Akses pelayanan, keefektifan pelayanan, keselamatan
Tujuan	Kemandirian keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan ODGJ di keluarganya
Definisi Operasional	Cakupan hasil akhir tingkat kemandirian keluarga (KM III dan IV) pada keluarga dengan penderita orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) setelah mendapatkan asuhan keperawatan keluarga minimal 4x kunjungan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah KM III dan IV pada keluarga dengan penderita ODGJ di wilayah kerja Puskesmas
Denominator	Jumlah keluarga yang anggota keluarganya ada penderita ODGJ di wilayah kerja Puskesmas
Sumber Data	Laporan Perkesmas
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan, kunjungan, pendokumentasian
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Perkesmas

- f. Asuhan keperawatan (Askep) kelompok

Judul	Askep kelompok
Dimensi Mutu	Akses pelayanan, efisiensi, keselamatan
Tujuan	Meningkatkan kemandirian kelompok risiko tinggi dalam menangani masalah kesehatan dikelompoknya
Definisi Operasional	Jumlah kelompok risti (prolanis, pengelompokkan bumil risti, kelompok balita risti, dll) yang mendapat asuhan keperawatan kelompok oleh petugas Puskesmas

Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah kelompok resti yang mendapatkan askep kelompok
Denominator	Jumlah kelompok resti yang ada di wilayah kerja
Sumber Data	Laporan Perkesmas
Target	80%
Langkah Kegiatan	Pendataan, kunjungan, pendokumentasian
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Perkesmas

g. Asuhan keperawatan (Askep) komunitas

Judul	Asuhan keperawatan (askep) komunitas
Dimensi Mutu	Akses pelayanan, efisiensi, keselamatan
Tujuan	Meningkatkan kemandirian desa dalam mengatasi masalah kesehatan yang ada
Definisi Operasional	Jumlah desa/kelurahan/RW yang mendapat asuhan keperawatan komunitas oleh perawat
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah desa/RW/RT atau kelurahan yang mendapat askep komunitas pada kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah desa/RW/RT atau kelurahan minimal 1 kali mendapat askep komunitas pada kurun waktu 1 tahun
Sumber Data	Laporan Perkesmas
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan, kunjungan, pendokumentasian
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Perkesmas

## 18. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat

### a. Cakupan pembinaan kesehatan gigi di posyandu di wilayah kerja

Judul	Cakupan pembinaan kesehatan gigi di posyandu di wilayah kerja
Dimensi Mutu	Kompetensi Teknis, Kestinambungan, Keamanan
Tujuan	Tercapainya derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal
Definisi Operasional	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang mendapat pembinaan kesehatan gigi dan mulut dari petugas Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu setahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tahun
Nominator	Jumlah UKBM yang mendapat pembinaan kesehatan gigi dan mulut di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah UKBM yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Buku catatan pembinaan ke Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM)
Target	80%
Langkah Kegiatan	Membuat jadwal, melaksanakan kegiatan UKGM, merekap kasus, merujuk pasien yang membutuhkan perawatan ke Puskesmas, membuat pelaporan
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut

### b. Cakupan Pembinaan Kesehatan Gigi dan Mulut di SD/MI

Judul	Cakupan Pembinaan Kesehatan Gigi dan Mulut di SD/MI
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis, Kestinambungan
Tujuan	Tercapainya derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal

Definisi Operasional	Cakupan pembinaan kesehatan gigi dan mulut di SD/MI adalah persentase SD/MI yang dibina oleh petugas Puskesmas dalam kurun waktu setahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 6 bulan
Periode Analisa	Setiap 6 bulan
Nominator	Jumlah SD/MI yang mendapatkan pembinaan kesehatan gigi dan mulut oleh petugas Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah SD/MI yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu setahun
Sumber Data	Catatan pembinaan yang dilakukan ke SD/MI
Target	80%
Langkah Kegiatan	Membuat jadwal/koordinasi sekolah, pelaksanaan kegiatan, pelaporan
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut

c. Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut Siswa SD

Judul	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut Siswa SD
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis, Keamanan
Tujuan	Tercapainya derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal
Definisi Operasional	Persentase siswa SD/MI yang mendapat pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut dari petugas Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 6 bulan
Periode Analisa	Setiap 6 bulan
Nominator	Jumlah siswa SD/MI yang mendapat pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut oleh petugas Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun

Denominator	Jumlah siswa SD/MI yang berada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Register pasien, buku catatan pembinaan
Target	80%
Langkah Kegiatan	Membuat jadwal/koordinasi sekolah, pelaksanaan kegiatan, merekap kasus, merujuk siswa yang butuh penanganan lebih lanjut, pelaporan
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut

d. Cakupan Penanganan Siswa SD yang membutuhkan Perawatan Kesehatan Gigi

Judul	Cakupan Penanganan Siswa SD yang membutuhkan Perawatan Kesehatan Gigi
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis, Keamanan, Kestinambungan
Tujuan	Tercapainya derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal
Definisi Operasional	Persentase siswa SD/MI yang mendapatkan penanganan berupa perawatan gigi oleh petugas di Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah siswa SD/MI yang mendapat penanganan oleh petugas Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah siswa SD/MI yang membutuhkan perawatan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Catatan pembinaan ke SD/MI
Target	100%

Langkah Kegiatan	Rekapan siswa yang dirujuk, tindakan/penanganan siswa yang butuh perawatan, pelaporan
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut

19. Pelayanan Kesehatan Tradisional (Kestrad) Komplementer

a. Pembinaan Kelompok Tanaman Obat Keluarga (TOGA)

Judul	Pembinaan Kelompok TOGA
Dimensi Mutu	Informasi
Tujuan	Meningkatkan pengetahuan TOGA kepada anggota pemilik TOGA
Definisi Operasional	Cakupan pembinaan kelompok TOGA (5-100 kepala keluarga) yang dibina oleh petugas Puskesmas yang berada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah kelompok TOGA yang mendapat pembinaan TOGA sesuai standar dari wilayah Puskesmas dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh kelompok TOGA yang ada di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan Kestrad
Target	100%
Langkah Kegiatan	Register, KIE, Pembinaan, Pencatatan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Kestrad

b. Pembinaan penyehat tradisional (Hatra)

Judul	Pembinaan penyehat tradisional
Dimensi Mutu	Hubungan antar manusia
Tujuan	Meningkatkan pengetahuan tentang Kesehatan Tradisional (Kestrad) kepada pemilik pelayanan kesehatan tradisional (Yankestrad)

Definisi Operasional	Pembinaan penyehat tradisional adalah upaya yang dilakukan berupa inventarisir, identifikasi dengan aplikasi hatra, pencatatan dan pelaporan kunjungan klien, serta fasilitas rekomendasi registrasi kesehatan tradisional di wilayah kerjasama Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah sasaran pemilik kestrad yang mendapatkan pembinaan kestrad sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh kestrad yang ada di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan Kestrad
Target	100%
Langkah Kegiatan	Register, KIE, Pembinaan, Pencatatan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Kestrad

c. Cakupan Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional

Judul	Cakupan Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional
Dimensi Mutu	Hubungan antar manusia
Tujuan	Mengetahui jumlah pemilik kestrad berijin atau terdaftar
Definisi Operasional	Cakupan penyehat tradisional terdaftar atau berijin yang mempunyai Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) / Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRKT) di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan

Nominator	Jumlah penyehat tradisional berijin atau terdaftar yang dibina petugas Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh kestrad yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan Kestrad
Target	100%
Langkah Kegiatan	Register, KIE, Pembinaan, Pencatatan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Kestrad

## 20. Pelayanan Kesehatan Olahraga

### a. Pengukuran kebugaran jema'ah haji

Judul	Pengukuran kebugaran jema'ah haji
Dimensi Mutu	Kesinambungan
Tujuan	Untuk mengetahui tingkat kebugaran calon jema'ah haji
Definisi Operasional	Jumlah calon jema'ah haji yang ada di wilayah kerja Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	1 tahun 2 kali
Periode Analisa	1 tahun 2 kali
Nominator	Jumlah calon jema'ah haji yang mengikuti pengukuran kebugaran
Denominator	Jumlah calon jema'ah haji yang ada di wilayah kerja Puskesmas
Sumber Data	Buku register calon jema'ah haji
Target	100%
Langkah Kegiatan	a. Pemeriksaan fisik b. Pemanasan c. Lari/jalan cepat 1600 m d. Pendinginan e. Pengukuran Kebugaran
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Kesehatan Olahraga

b. Pengukuran kebugaran anak sekolah

Judul	Pengukuran kebugaran anak sekolah
Dimensi Mutu	Kesinambungan
Tujuan	Untuk mengetahui tingkat kebugaran anak sekolah
Definisi Operasional	Jumlah seluruh siswa SD kelas 4 atau 5 yang mengikuti pengukuran kebugaran
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap tahun
Periode Analisa	Setiap tahun
Nominator	Jumlah seluruh siswa SD kelas 4 atau 5 yang ada di wilayah kerja Puskesmas
Denominator	Jumlah seluruh siswa SD kelas 4 atau 5 yang mengikuti pengukuran kebugaran
Sumber Data	Laporan Kesehatan Olahraga
Target	100%
Langkah Kegiatan	a. Pemanasan b. Lari 1000 meter c. Pendinginan d. Menghitung hasil kebugaran
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Kesehatan Olahraga

c. Pengukuran kebugaran guru olahraga

Judul	Pengukuran kebugaran guru olahraga
Dimensi Mutu	Kesinambungan
Tujuan	Untuk mengetahui tingkat kebugaran guru olahraga SD
Definisi Operasional	Jumlah seluruh guru olahraga SD yang ada di wilayah kerja Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap tahun
Periode Analisa	Setiap tahun
Nominator	Jumlah guru olahraga SD yang mengikuti pengukuran kebugaran
Denominator	Jumlah seluruh guru olahraga SD yang ada di wilayah kerja Puskesmas

Sumber Data	Buku register pengukuran kebugaran
Target	100%
Langkah Kegiatan	a. Pemeriksaan fisik b. Pemanasan c. Kegiatan inti pengukuran kebugaran dengan cara lari/jalan cepat 1000 meter d. Pendinginan
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Kesehatan Olahraga

d. Pembinaan kelompok olahraga

Judul	Pembinaan kelompok olahraga
Dimensi Mutu	Kesinambungan
Tujuan	Untuk meningkatkan kesehatan kelompok olahraga
Definisi Operasional	Jumlah seluruh kelompok olahraga yang mendapat pembinaan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap tahun
Periode Analisa	Setiap tahun
Nominator	Jumlah kelompok olahraga yang dilakukan pembinaan
Denominator	Jumlah seluruh kelompok olahraga yang ada di wilayah kerja Puskesmas
Sumber Data	Buku register pembinaan kelompok
Target	100%
Langkah Kegiatan	a. Pemeriksaan fisik b. Penyuluhan kesehatan
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Kesehatan Olahraga

## 21. Pelayanan Kesehatan Kerja

### a. Pembentukan pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)

Judul	Pembentukan pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK)
Dimensi Mutu	Kesinambungan, Hubungan antar manusia
Tujuan	Melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh-pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan
Definisi Operasional	<p>a. Pos UKK adalah bentuk pemberdayaan masyarakat di kelompok pekerja informal utamanya di dalam upaya promotif, preventif</p> <p>b. Jumlah Pos UKK yang terbentuk minimal 1 (satu) Puskesmas terbentuk 1 (satu) Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap tahun
Periode Analisa	Setiap tahun
Nominator	Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas
Denominator	Jumlah Pos UKK yang akan dibentuk di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Laporan UKK
Target	100%
Langkah Kegiatan	Persiapan SDM, tempat dan alat, Penyuluhan, Pemeriksaan Kesehatan, Pencatatan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana UKK

### b. Pendataan Perusahaan Industri

Judul	Pendataan Perusahaan Industri
Dimensi Mutu	Keterjangkauan atau akses, Informasi
Tujuan	Memperoleh data valid dari hasil pendataan

Definisi Operasional	a. Pendataan Perusahaan Industri adalah pengumpulan data setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri b. Pendataan perusahaan/industri yang ada di wilayah kerja Puskesmas baik formal maupun informal
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap tahun
Periode Analisa	Setiap tahun
Nominator	Jumlah perusahaan (industri) yang dilakukan pendataan oleh petugas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah perusahaan (industri) yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan Bulanan UKK, Pos UKK
Target	20%
Langkah Kegiatan	Persiapan SDM, Format Pendataan, Pencatatan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi
Penanggung Jawab	Pelaksana UKK

## 22. Pelayanan Kesehatan Lainnya

### a. Cakupan penanganan kasus kelainan refraksi

Judul	Cakupan penanganan kasus kelainan refraksi
Dimensi Mutu	Kenyamanan
Tujuan	Untuk memperbaiki tajam penglihatan, fungsi visual dan kenyamanan penglihatan
Definisi Operasional	Persentase jumlah penanganan kasus dengan kelainan refraksi pada siswa kelas V sampai dengan VII di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan

Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah kasus kelainan refraksi yang ditangani pada siswa kelas V sampai dengan VII di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah kasus kelainan refraksi yang ditemukan pada siswa kelas V sampai dengan VII di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Hasil kegiatan pemeriksaan siswa
Target	100%
Langkah Kegiatan	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan siswa, merekap kasus kelainan refraksi yang ditemukan, memberikan surat rujukan dan pemberitahuan kepada orang tua / wali tentang kasus kelainan refraksi pada siswa yang ditemukan
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Kesehatan Indera

b. Cakupan penanganan katarak

Judul	Cakupan penanganan katarak
Dimensi Mutu	Kenyamanan, hubungan antar manusia
Tujuan	Untuk memperbaiki tajam penglihatan dan mengembalikan penglihatan dalam kondisi normal
Definisi Operasional	Persentase jumlah penanganan penyakit katarak di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan

Nominator	Jumlah pasien katarak yang dioperasi di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah pasien terdeteksi katarak di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Data penderita katarak yang sudah dilakukan operasi
Target	100%
Langkah Kegiatan	Mengumpulkan data penderita katarak yang sudah dioperasi, merekap data dan melakukan analisa
Penanggung Jawab	Pelaksana Upaya Kesehatan Indera

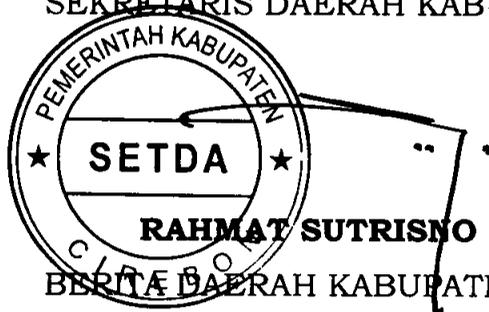
**BUPATI CIREBON,**

**TTD**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal **20 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR **153** SERI ■